

# FROM MINING REPUBLIC TO COLONIAL DISTRICT: THE POST COMPANY WAR TRANSFORMATION OF MONTERADO 1850-1879

## Dari Republik Tambang Ke Distrik Kolonial: Transformasi Monterado Pasca-Perang Kongsi 1850-1879

Hendar Prayoga<sup>1a\*</sup>, Andang Firmansyah<sup>2b</sup>, Mohammad Rikaz Prabowo<sup>3c</sup>

<sup>123</sup>Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak

<sup>a</sup>[hendar.bky@gmail.com](mailto:hendar.bky@gmail.com)

<sup>b</sup>[andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id](mailto:andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id)

<sup>c</sup>[m.rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id](mailto:m.rikaz.prabowo@fkip.untan.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[hendar.bky@gmail.com](mailto:hendar.bky@gmail.com)

**How to Cite:** Prayoga, Firmansyah, And Prabowo. (2026). From Mining Republic To Colonial District: The Post Company War Transformation Of Monterado 1850-1879. doi: 10.36526/js.v3i2.7727

### Abstract

Received : 22-03-2026

Revised : 01-04-2026

Accepted : 29-04-2026

### Keywords:

Monterado,  
mining kongsi,  
Dutch colonialism,  
migration,  
institutional transformation

This study examines the transformation of Monterado, Bengkayang Regency, from a gold mining center managed under the kongsi system to a Dutch colonial administrative region during the period 1850–1879. While previous research has touched on this aspect, there is a historiographical gap regarding an in-depth analysis of the drastic transition from a consensus-based governance system to a hierarchical colonial bureaucracy, and the impact of this transformation until the late 1870s. Using historiographical methods through economic, political, and sociological approaches, this study analyzes the dynamics of the collapse of the gold kongsi and its impact on the socio-economic structure of the community. The findings indicate that internal conflicts between kongsi due to the depletion of gold reserves, Dutch military intervention through the Kongsi War (1850–1854), and the formal dissolution policy in 1854 were the main factors behind the collapse of the kongsi system. The dissolution triggered a mass migration of approximately 4,000 refugees to Sarawak and thousands more to coastal areas of West Kalimantan. This transformation ended the democratic kongsi government that had existed since 1776 and replaced it with a hierarchical colonial bureaucracy, placing the assistant resident as the highest authority. The main contribution of this research is to fill the narrative gap regarding the process of social disintegration and demographic reorganization, and to explain the roots of the formation of a hybrid Chinese-Malay identity in the coastal region by tracing three waves of post-war migration. These fundamental changes not only reshaped the political landscape but also created economic decline and structural dependence on the colonial government with long-term consequences.

## PENDAHULUAN

Monterado merupakan salah satu pusat pertambangan emas di Kalimantan Barat. Pada masa kejayaannya, kota ini berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas sosial-budaya komunitas Tionghoa yang terorganisir melalui sistem kongsi. Sistem kongsi emas di Monterado tidak hanya berfungsi sebagai organisasi ekonomi pertambangan, tetapi juga sebagai entitas quasi-state yang memiliki perangkat pemerintahan lengkap, termasuk sistem peradilan, pasukan bersenjata, dan infrastruktur pemukiman yang terorganisir.

Penelitian ini mengisi kekosongan narasi mengenai transisi Monterado menjadi distrik administratif Belanda periode 1850-1879. Studi yang dilakukan (Rahmayani, 2015) terbatas hingga tahun 1858, sementara (Yogi, 2016) lebih fokus pada lanskap budaya. Meskipun (Elvira Aprilia et

al., 2023) mengkaji penghapusan kongsi, dampak transformasi institusional hingga akhir 1870-an belum dibedah secara mendalam. Terdapat celah dalam menganalisis bagaimana sistem berbasis konsensus runtuh total dan digantikan birokrasi hierarkis kolonial.

Kajian ini sangat krusial untuk memahami proses disintegrasi sosial dan reorganisasi demografis di Kalimantan Barat. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis fenomena transisi pekerjaan dari penambang menjadi petani. Selain itu, pelacakan tiga gelombang migrasi pasca-perang menjelaskan akar terbentuknya identitas hibrida Tionghoa-Melayu di wilayah pesisir. Pemahaman ini penting untuk melengkapi historiografi lokal tentang perubahan sistem otonom menjadi wilayah yang tunduk sepenuhnya pada Batavia.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab keruntuhan kongsi emas di Monterad; (2) Mendeskripsikan dinamika Perang Kongsi (1850-1854) dan strategi militer Belanda; dan (3) Mengkaji dampak pembubaran kongsi terhadap migrasi penduduk dan perubahan komposisi demografis periode 1850-1879. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang proses transformasi institusional dalam konteks kolonialisme, khususnya terkait perubahan dari sistem pemerintahan otonom berbasis komunitas menuju sistem administrasi kolonial yang terpusat.

## METODE

Bagian metode harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya. Alat, bahan, media atau instrumen penelitian harus dijelaskan dengan baik. Apabila ada rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku umum dalam 500-1000 kata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau historiografi yang dilakukan melalui empat tahapan utama, yakni heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2003) menegaskan bahwa tahapan tersebut merupakan prasyarat mutlak dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau secara ilmiah. Fokus penelitian diarahkan pada dimensi spasial di wilayah Monterado, Kabupaten Bengkayang, dengan batasan temporal antara tahun 1850 hingga 1879, yang merupakan masa transisi kritis dari sistem otonom kongsi ke administrasi kolonial. Penetapan batasan ruang di Monterado dan waktu antara 1850-1879 ini merujuk pada pemikiran (Kartodirdjo, 1992), yang memandang bahwa dimensi spasial dan temporal adalah kerangka utama untuk memahami dinamika perubahan sosial-politik dalam suatu proses sejarah.

Tahap heuristik dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen arsip kolonial dan peta wilayah Monterado abad ke-19 yang diakses melalui Universitas Leiden Digital Collections, serta berita surat kabar sezaman seperti *Zierikzeesche Courant* dan *Middelburgsche Courant* yang diperoleh dari pangkalan data Delpher. Selain itu, data diperkuat dengan literatur klasik karya P.J. Veth (2017), W.A. Van Rees (2016), dan Mary Somers Heidhues (2008) yang membahas dinamika masyarakat Tionghoa dan intervensi Belanda di Kalimantan Barat. Untuk melengkapi data tertulis, dilakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat dan ahli budaya untuk mendapatkan perspektif lisan mengenai sejarah lokal Monterado.

Data yang terkumpul melalui proses verifikasi yang ketat bertujuan untuk memastikan objektivitas penelitian. Kritik eksternal dilakukan dengan menelaah autentisitas fisik sumber, terutama keaslian dokumen digital dan peta lama. Sementara itu, kritik internal berfokus pada penilaian kredibilitas isi informasi dengan cara membandingkan berbagai laporan surat kabar dan dokumen resmi Belanda, sehingga bias kolonial dapat diminimalkan. Gottschalk (1969) menyatakan bahwa "setiap dokumen harus diuji kebenarannya, baik dari segi bentuk (eksternal) maupun isi (internal), untuk menentukan nilai kesaksiannya sebagai fakta sejarah." Dengan demikian, bias kolonial dalam sumber-sumber tersebut dapat diminimalkan melalui komparasi data yang kritis.

Tahap interpretasi dilakukan dengan pendekatan multidimensional untuk membedah fakta sejarah secara lebih mendalam. Penggunaan model ini merujuk pada pemikiran (Kartodirdjo,

1992), yang menegaskan bahwa "sejarah tidak cukup hanya dipahami melalui urutan peristiwa politik, melainkan harus melibatkan konsep ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan kompleksitas fenomena di baliknya." Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis perubahan komposisi penduduk serta pola migrasi massal yang terjadi setelah pembubaran kongsi. Sementara itu, pendekatan ekonomi dimanfaatkan untuk menelaah transformasi struktural yang berlangsung, yakni pergeseran dari sektor pertambangan emas menuju sektor pertanian. Seluruh fakta sejarah yang ditemukan kemudian disintesis menjadi narasi kronologis yang menjelaskan perkembangan dan transformasi kota Monterado selama periode transisi kekuasaan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Faktor Internal

Keruntuhan kongsi emas di Monterado tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui proses gradual yang dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal utama adalah konflik antar kongsi yang semakin intensif akibat deplesi cadangan emas. Pada pertengahan abad ke-19, lokasi-lokasi pertambangan yang telah lama dioperasikan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas emas yang signifikan. Kondisi ini menciptakan persaingan ketat untuk menguasai area tambang yang masih produktif.

Monterado memiliki 14 kongsi yang tergabung dalam federasi Heshun Zongting pada tahun 1776, jumlahnya terus menyusut menjadi 12 kongsi pada tahun 1807, dan hanya tersisa 4 kongsi pada tahun 1808. Penyusutan ini mencerminkan intensitas konflik internal yang mengikis solidaritas federasi. Kongsi Thaikong yang merupakan yang terbesar dan terkuat akhirnya mengambil alih kekuasaan dari Fo Sjoen, menandai pergeseran dari struktur federatif menuju dominasi kongsi tunggal (Veth, 2017).

Konflik terbuka antara Thaikong dan Samtiaokioe menjadi manifestasi dari ketegangan internal yang telah lama terpendam. Menurut (Rivai, 2000), pokok masalah konflik ini adalah Samtiaokioe dengan sengaja melakukan perbuatan curang dengan mengerjakan pertambangan emas pada suatu tempat yang berada di dalam perbatasan Thaikong. Kesudahannya, persengketaan ini berkobar menjadi perang saudara. Perlawanan dari Samtiaokioe dapat dikalahkan oleh Thaikong karena ketidakseimbangan kekuatan Thaikong lebih rapi dan memiliki persenjataan yang lebih lengkap.

Dinamika konflik internal juga diperparah oleh perubahan kondisi geologis tambang yang semakin sulit diakses. Teknologi penambangan tradisional yang dimiliki kongsi mulai tidak memadai untuk mengekstrak emas dari kedalaman yang lebih dalam, sementara investasi untuk teknologi baru memerlukan modal besar yang tidak dimiliki semua kongsi. Kesenjangan teknologi ini menciptakan ketimpangan produktivitas antar kongsi, dimana kongsi yang lebih kaya mampu mempertahankan produksi sementara kongsi kecil mulai kesulitan (Munandar, 2020).

Struktur kepemimpinan dalam federasi Heshun Zongting yang awalnya demokratis mulai mengalami ketegangan ketika kepentingan ekonomi masing-masing kongsi berbenturan. Sistem pengambilan keputusan yang memerlukan konsensus menjadi sulit dicapai karena setiap kongsi lebih memprioritaskan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Hal ini menciptakan kebuntuan dalam pengambilan kebijakan strategis, terutama terkait pembagian wilayah tambang dan alokasi sumber daya.

#### Faktor Eksternal

Kebijakan Belanda terhadap Kalimantan Barat mengalami perubahan signifikan pada tahun 1849. Sebelum tahun ini, pemerintah kolonial hanya mempertahankan pos-pos perdagangan di pantai dengan pasukan yang terbatas dan menghindari keterlibatan dalam masalah-masalah internal komunitas Tionghoa. Namun, pada tahun 1849, Gubernur Jenderal J.J. Rochussen menerapkan kebijakan baru yang lebih agresif untuk campur tangan yang lebih jauh. Pada tahun

yang sama, Rochussen membagi Kalimantan menjadi dua keresidenan Kalimantan Barat dan Borneo Bagian Selatan dan Timur sebuah pembagian wilayah administratif yang akan bertahan hingga menjelang berakhirnya masa kolonial (G. B. Hooyer, 1896).

Pada bulan Februari 1850, residen baru bernama T.J. Willer tiba di Kalimantan Barat dengan mandat untuk melaksanakan kebijakan baru ini. Willer bersama Pembantu Residen R.C. Van Prehn di Sambas diharapkan dapat menerapkan monopoli perdagangan dengan lebih ketat dan meningkatkan pendapatan kolonial dari wilayah ini. Namun, pemerintah kolonial Belanda menghadapi dilema serius: meskipun memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan empat dekade sebelumnya, pasukan yang tersedia untuk ditugaskan di Sambas dan Pontianak pada pertengahan abad ke-19 masih tidak lebih dari 200 tentara, kebanyakan dari mereka tidak siap tempur (Heidhues, 2008).

Posisi Batavia pada pertengahan abad ke-19 secara keseluruhan lebih kuat dibandingkan tahun 1819, ketika Belanda pertama kali campur tangan di Kalimantan Barat. Perkembangan teknologi maritim memberikan keunggulan baru kepada Belanda. Angkatan laut Belanda telah dilengkapi dengan kapal-kapal bermesin uap terbaru, yang sangat berbeda dengan kapal layar tradisional yang sebelumnya digunakan (Schaank, 2015). Teknologi ini memungkinkan kapal Belanda untuk berpatroli sepanjang pantai dan sungai-sungai strategis dengan lebih efektif, melampaui keterbatasan angin dan arus yang sebelumnya menghambat mobilitas kapal layar.

Faktor pemicu langsung yang memberikan legitimasi bagi intervensi militer Belanda adalah penemuan penyelundupan opium dan senjata. Sebuah perahu kecil yang membawa muatan candu, garam, dan serbuk mesiu ditemukan memasuki Sungai Sedau menuju Monterado pada tahun 1850. Penemuan ini memberikan kepada Belanda alasan legal dan moral untuk menindak keras terhadap kongsi. Opium sebagai komoditas terlarang yang monopolinya dikontrol ketat oleh pemerintah Belanda melalui sistem pacht (lisensi perdagangan), sehingga penyelundupan opium merupakan pelanggaran langsung terhadap monopoli negara kolonial. Kehadiran serbuk mesiu dalam muatan perahu juga sangat signifikan, karena menunjukkan bahwa kongsi-kongsi mempersiapkan diri untuk perlawanan bersenjata (Van Rees, 2016).

Insiden di Sedau pada Mei 1850 berakhir dengan kemenangan taktis Thaikong yang justru menjadi pemicu untuk konflik skala yang lebih besar dan lebih destruktif. Dengan kepercayaan diri yang meningkat dari berhasil menolak Belanda di Sedau, Thaikong meluncurkan kampanye militer yang terkoordinasi melawan Samtiaokioe, sebuah kongsi yang telah bersaing dengannya sejak lama untuk dominasi di pantai barat. Thaikong memiliki pasukan bersenjata yang jauh lebih kuat daripada Samtiaokioe, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas persenjataan.

Kota pelabuhan Pemangkat, yang merupakan pusat operasi Samtiaokioe, diserang pada bulan Agustus 1850 dan jatuh ke tangan Thaikong. Serangan juga dilakukan terhadap pemukiman-pemukiman lain di Sepang, Seminis, dan Sebawi, mengakibatkan kerugian besar dalam infrastruktur pertambangan dan pemukiman mereka (Van Rees, 2016). Kehancuran Samtiaokioe yang terkonsentrasi pada Agustus 1850 ini menghasilkan gelombang besar-besaran pengungsi, dengan diperkirakan sekitar 4.000 orang anggota Samtiaokioe melarikan diri ke Sarawak, di mana rajah Inggris James Brooke memberikan perlindungan. Diperkirakan dua ribu pengungsi lainnya dari Samtiaokioe tersebar ke berbagai wilayah di Borneo Belanda, dengan banyak yang mengungsi ke Lanfang, kongsi pertambangan yang masih bertahan di Mandor (Heidhues, 2008).

### **Intervensi Belanda**

Perang Kongsi yang awalnya dimulai dari insiden kecil di Sedau akhirnya berkembang menjadi konflik militer berskala besar yang melibatkan pemerintah kolonial secara langsung. Setelah beberapa tahun melakukan operasi-operasi terbatas dengan hasil yang tidak memuaskan, pada Mei 1854 pemerintah Belanda mengirimkan ekspedisi besar-besaran di bawah komando Kepala Operasi Militer (Major/Overste) A.J. Andresen. Pasukan yang dikirimkan jauh lebih besar dari operasi-operasi sebelumnya, terdiri dari 2.200 prajurit dengan persenjataan modern yang mencakup howitzer, mortir,

dan artileri lainnya. Armada Belanda juga mengirimkan kapal perang modern dengan persenjataan canggih untuk mendukung operasi darat, mencakup tiga kapal perang bermesin uap dan lebih dari selusin kapal serang (kruisboot) yang dilengkapi dengan senapan dan meriam kecil (G. B. Hooyer, 1896).

Strategi Belanda difokuskan pada pembatasan ketat terhadap jalur-jalur sungai utama yang menghubungkan Monterado dengan daerah pedalaman. Dengan memblokir tiga muara sungai utama Sebadoe dan Selakau Belanda secara efektif memotong jalur pasokan makanan dan bahan persenjataan yang vital bagi pertahanan Thaikong di Monterado. Strategi maritim ini terbukti jauh lebih efektif daripada serangan darat langsung, karena kongsi bergantung pada arus perdagangan untuk mempertahankan prajurit mereka dan memperoleh persenjataan dari Singapura.

Blokade maritim yang diterapkan Belanda menciptakan kondisi kelaparan dan kekurangan amunisi di Monterado. Harga beras meningkat drastis, seperti dilaporkan dalam surat kabar Belanda edisi 21 Desember 1850 yang memberitakan bahwa kekalahan pasukan Kongsi membuat harga beras naik signifikan. Kondisi ekonomi yang memburuk ini melemahkan daya tahan Thaikong untuk melanjutkan perlawanan.

Pada bulan Oktober 1854, setelah lima bulan kampanye militer yang intensif, pasukan Belanda berhasil merebut Monterado. Penyerangan terakhir terhadap benteng pertahanan Thaikong di pusat kota mengakibatkan kehancuran sebagian besar infrastruktur kota, termasuk gudang, rumah pemimpin kongsi, dan fasilitas umum. Kehancuran fisik ini menjadi simbol berakhirnya era kongsi emas di Monterado. Pada tanggal 5 Desember 1854, peraturan pemerintah kolonial dapat ditegakkan sepenuhnya di Monterado, mengakhiri lebih dari tiga abad sistem pemerintahan otonom berbasis kongsi di wilayah ini.

## Pembahasan

Pembubaran kongsi emas dan kekalahan dalam Perang Kongsi memicu gelombang migrasi massal yang mengubah lanskap demografis Monterado secara fundamental. Migrasi ini terjadi dalam beberapa gelombang dan melibatkan berbagai segmen masyarakat Tionghoa dengan tujuan dan motivasi yang berbeda-beda.

Gelombang pertama terjadi segera setelah kehancuran Samtiaokioe pada Agustus 1850. Sekitar 4.000 anggota Samtiaokioe melarikan diri ke Sarawak, di mana mereka mendapat perlindungan dari Rajah James Brooke. Komunitas Hakka yang menjadi inti dari Samtiaokioe kemudian mendirikan kembali kongsi mereka di Bau, dekat perbatasan dengan wilayah Belanda, di mana mereka melanjutkan kegiatan pertambangan emas di bawah perlindungan Brooke (Heidhues, 2008). Migrasi ini menunjukkan bahwa komunitas pertambangan Tionghoa mempertahankan kohesi sosial dan identitas kolektif mereka bahkan setelah kehilangan basis teritorial mereka di Monterado.

Gelombang kedua terjadi pada tahun 1853-1854, ketika perang semakin intensif dan kondisi keamanan di Monterado memburuk. Banyak pekerja tambang dari berbagai persekutuan melarikan diri ke Singkawang dan menjalankan pertanian di wilayah tersebut. Mereka yang sebelumnya hanya memiliki keahlian di bidang pertambangan mulai berlatih dan beralih ke bidang pertanian untuk bertahan hidup (Rahmayani, 2015). Transisi dari pekerja tambang menjadi petani ini merupakan perubahan okupasional yang signifikan dan tidak mudah, mengingat perbedaan fundamental antara keterampilan pertambangan dan pertanian.

Gelombang ketiga migrasi terjadi setelah pembubaran formal kongsi pada Desember 1854. Hilangnya struktur kelembagaan kongsi, ditambah dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah kolonial melalui pajak kepala dan berbagai regulasi yang membatasi, mendorong banyak penduduk Monterado untuk meninggalkan wilayah tersebut. Mereka mencari daerah lain yang menawarkan peluang ekonomi lebih baik atau beban pajak yang lebih ringan. Singkawang dan wilayah pesisir menjadi tujuan utama karena potensi pertanian dan perdagangan yang lebih menjanjikan serta akses yang lebih mudah ke jalur perdagangan maritim. Mandor dan wilayah

kongsi Lanfang juga menarik bagi mereka yang masih ingin terlibat dalam pertambangan emas, sebab kongsi Lanfang masih bertahan dan belum sepenuhnya dikuasai Belanda pada periode itu.

Selain itu, Pontianak sebagai pusat administratif dan komersial yang berkembang menjadi magnet bagi migran yang ingin beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Beberapa kelompok kecil juga memilih daerah pedalaman Kalimantan Barat yang masih menyimpan cadangan emas atau potensi pertanian yang belum dieksploitasi. Migrasi massal ini mengubah struktur sosial-ekonomi Monterado secara fundamental, dengan populasi yang menurun drastis dari sekitar 30.000-40.000 jiwa pada puncak kejayaan kongsi menjadi hanya beberapa ribu jiwa pada akhir 1850-an. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada aspek demografis, tetapi juga melemahkan vitalitas ekonomi dan sosial kota.

Dengan berkurangnya populasi, aktivitas perdagangan di Monterado menurun signifikan. Pasar-pasar yang sebelumnya ramai menjadi sepi, dan banyak pedagang yang mengikuti migrasi penduduk ke daerah-daerah tujuan baru. Infrastruktur kota yang sebelumnya terjaga dengan baik mulai terbengkalai karena tidak ada lagi institusi komunal yang bertanggung jawab untuk pemeliharaannya. Rumah-rumah kosong dan gudang-gudang yang ditinggalkan menjadi simbol fisik dari kehancuran kongsi.

Migrasi juga mengubah komposisi etnis wilayah ini. Jika sebelumnya orang Tionghoa menjadi kelompok dominan di Monterado, setelah migrasi besar-besaran, kawasan bekas tambang tersebut menjadi lebih jarang penduduk dan kehilangan statusnya sebagai pusat ekonomi dan sosial. Sementara itu, daerah-daerah baru seperti Singkawang berkembang pesat dengan komposisi penduduk yang lebih beragam didominasi oleh Tionghoa, tetapi juga diwarnai kehadiran etnis Dayak, Melayu, dan Bugis (Hartini et al., 2022).

Perubahan struktur keluarga juga terjadi akibat migrasi. Banyak keluarga yang terpaksa berpisah karena tidak semua anggota keluarga mampu atau mau pindah ke daerah baru. Hal ini menciptakan keluarga inti yang lebih kecil dibanding sistem keluarga besar tradisional yang sebelumnya dominan. Perubahan ini juga berdampak pada sistem nilai dan tradisi. Di daerah tujuan migrasi, komunitas Tionghoa harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda, termasuk interaksi yang lebih intensif dengan etnis Melayu dan Dayak. Proses akulturasi ini melahirkan tradisi-tradisi baru yang merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa dengan budaya lokal.

Migrasi massal juga berarti hilangnya institusi-institusi sosial yang sebelumnya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Di bawah sistem kongsi, berbagai institusi sosial seperti perkumpulan amal, organisasi pemakaman, organisasi kesehatan, dan berbagai perkumpulan lainnya berfungsi untuk memberikan perawatan kepada anggota komunitas yang rentan. Ketika komunitas Tionghoa terfragmentasi melalui migrasi, institusi-institusi ini mengalami kesulitan keuangan dan kelembagaan. Donasi yang sebelumnya datang dari pedagang yang kaya dan pemimpin kongsi mulai menurun (Heidhues, 2008).

Khususnya bagi orang lanjut usia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat bermigrasi bersama keluarga mereka, hilangnya institusi sosial yang berfungsi dengan baik berarti mereka menjadi rentan terhadap penelantaran atau pengabaian. Pemerintah kolonial tidak menyediakan program kesejahteraan sosial yang sebanding, karena pandangan mereka adalah bahwa kesejahteraan merupakan tanggung jawab komunitas sendiri, bukan pemerintah. Hasil dari kondisi ini adalah kemunduran dalam jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling rentan (Munandar, 2020).

Migrasi dan perubahan komposisi penduduk juga berdampak pada identitas komunal dan nilai-nilai sosial komunitas Tionghoa. Dalam sistem kongsi, rasa solidaritas komunitas didasarkan pada partisipasi bersama dalam kegiatan pertambangan emas dan kerangka kelembagaan bersama dari kongsi. Identitas seseorang sebagai Tionghoa dalam konteks Monterado sebagian besar ditentukan oleh keanggotaan dalam kongsi tertentu. Di bawah sistem kolonial dan pasca-migrasi, kerangka kelembagaan bersama ini tidak ada, sehingga basis dari solidaritas dan identitas menjadi lebih terpecah (Heidhues, 2008).

Di daerah-daerah tujuan migrasi, terutama di wilayah pesisir seperti Singkawang, komunitas Tionghoa mulai mengembangkan strategi adaptasi baru. Salah satu strategi yang paling signifikan adalah perkawinan campuran antara Tionghoa dengan etnis Melayu. Perkawinan ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi tetapi juga sebagai strategi adaptasi sosial dalam menghadapi diskriminasi dan pembatasan yang diberlakukan pemerintah kolonial terhadap komunitas Tionghoa. Anak-anak hasil perkawinan campuran ini mengembangkan identitas budaya hibrid yang mencerminkan proses akulturasi dan asimilasi (Hartini et al., 2022).

Proses adaptasi budaya ini melahirkan komunitas baru dengan identitas yang berbeda dari komunitas Tionghoa di Monterado pada masa kongsi. Komunitas ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya Tionghoa seperti bahasa, kuliner, dan praktik keagamaan dengan elemen-elemen budaya Melayu seperti bahasa Melayu, praktik Islam bagi sebagian yang memeluk agama Islam, dan adat istiadat lokal. Proses "melayunisasi" ini menciptakan identitas Tionghoa-Melayu yang unik di Kalimantan Barat dan menjadi karakteristik demografi wilayah pesisir hingga saat ini.

Untuk memahami secara lebih mendalam dinamika perubahan sosial-ekonomi tersebut, diperlukan analisis dengan menggunakan kerangka teori yang relevan serta perbandingan dengan studi lain. Secara komparatif, kasus Monterado menunjukkan bahwa perubahan sosial akibat kolonialisme tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk adaptasi baru dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa masyarakat kolonial sering kali mengembangkan strategi adaptif dalam menghadapi tekanan struktural dari kekuasaan kolonial (Reid, 2015).

Dilihat dari perspektif disintegrasi sosial, runtuhnya institusi kongsi menyebabkan melemahnya kohesi sosial, hilangnya jaring pengaman sosial, dan fragmentasi komunitas. Namun demikian, proses ini juga diikuti dengan reintegrasi dalam bentuk baru melalui adaptasi budaya dan pembentukan identitas hibrid. Kondisi ini dapat dipahami melalui konsep *anomie* dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat modern (Castles et al., 2014).

Jika dianalisis menggunakan *dependency theory*, perubahan ekonomi pasca runtuhnya kongsi mencerminkan pergeseran dari sistem ekonomi mandiri menuju ketergantungan pada pusat ekonomi kolonial. Migrasi ke wilayah pesisir menunjukkan integrasi ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas, namun dalam posisi subordinat. Fenomena ini sesuai dengan argumen bahwa wilayah periferi cenderung mengalami ketergantungan struktural terhadap pusat dalam sistem ekonomi global (Cardoso & Faletto, 2024).

Dalam perspektif teori kolonialisme, kehancuran kongsi emas tidak dapat dipisahkan dari intervensi kekuasaan kolonial Belanda yang berupaya mengonsolidasikan kontrol atas sumber daya ekonomi dan wilayah. Negara kolonial cenderung menghancurkan institusi lokal yang otonom dan menggantinya dengan struktur yang lebih mudah dikendalikan. Dalam konteks Monterado, kongsi sebagai entitas semi-republik yang mandiri dipandang sebagai ancaman terhadap hegemoni kolonial, sehingga pembubarannya memicu disrupsi sosial-ekonomi. Hal ini konsisten dengan kajian kolonial yang menekankan dominasi kekuasaan dan restrukturisasi sosial oleh negara kolonial (Osterhammel, 2005).

Jejak peradaban pertambangan emas milik kongsi-kongsi ini kemudian hampir lenyap, tergantikan oleh pertambangan tradisional yang dilakukan tanpa transfer teknologi yang memadai. Keruntuhan sistem kongsi emas di Monte rado menandai berakhirnya salah satu bentuk pemerintahan otonom tertua di Nusantara, yang oleh beberapa peneliti Barat dianggap memiliki karakteristik sistem demokrasi republik sebelum konsep tersebut berkembang di dunia Barat.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keruntuhan kongsi emas di Monterado disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, yakni konflik antar kongsi akibat deplesi emas serta intervensi militer dan kebijakan kolonial Belanda dalam Perang Kongsi 1850–1854. Proses tersebut mengakhiri sistem pemerintahan berbasis konsensus dan menggantinya dengan birokrasi kolonial

yang hierarkis. Dampaknya terlihat pada migrasi massal penduduk, perubahan struktur ekonomi dari pertambangan ke pertanian, serta terbentuknya identitas hibrida Tionghoa-Melayu di wilayah pesisir hingga akhir 1870-an.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan sumber primer lokal yang terbatas dan dominasi arsip kolonial yang berpotensi bias, serta ruang lingkup yang hanya terfokus pada Monterado periode 1850–1879. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya memahami transformasi institusional dalam konteks kolonialisme sebagai proses yang tidak hanya destruktif, tetapi juga melahirkan adaptasi sosial baru. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai sejarah lokal, migrasi, dan pembentukan identitas masyarakat di Kalimantan Barat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (2024). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.13083432>
- Castles, Stephen., Haas, H. de., & Miller, M. J. (2014). *The age of migration: international population movements in the modern world* (5th ed.). Guilford Press.
- Elvira Aprilia, U., Dwi Harnum, S., & Liya. (2023). Perang Kongsi di Kota Tambang Emas Kalimantan Barat Pada Abad Ke 19. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i3.72098>
- G. B. Hooyer. (1896). *De Krijgsgeschiedenis Van Nedeklandsch-Indië Van 1811 Tot 1894* (2nd ed.).
- Gottschalk, L. R. (1969). *Understanding History; A Primer Of Historical Method*. Alfred A. Knopf.
- Hartini, S., Buwono, S., Wiyono, H., Aminuyati, A., & Atmaja, T. S. (2022). *Interaksi Sosial Etnis*
- Tionghoa dan Etnis Melayu di Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 643. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.57295>
- Heidhues, S. M. (2008). *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat* (S. Mihardja, Ed.). Yayasan Nabil.
- Kartowirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (S. Pusposaputro, Ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (M. Yahya, Rosidik, Ramyari, & W. Ong, Eds.; 2nd ed.). PT. Tiara Wacana Yogya.
- Madya, S. (2011). *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan (Action Research)*. Bandung: Alfabeta.
- Munandar, A. (2020). *Pengaruh Candu Terhadap Aspek Sosial-Budaya dan Ekonomi Etnis Tionghoa di Sambas Tahun 1909-1942*.
- Osterhammel, J. (2005). *Colonialism: a theoretical overview*. Markus Wiener Publishers.
- Rahmayani, A. (2015). *Montrado 1818-1858: Dinamika Kota Tambang Emas*.
- Reid, Anthony. (2015). *A history of Southeast Asia: critical crossroads*.
- Wiley Blackwell. Rivai, M. (2000). *Pecahnya Perang Monterado* (Nanang, Ed.). Romeo Grafika.
- Schaank. (2015). *Kongsi-Kongsi Di Montrado* (Supradah Sigit & Setyoseno Bimo, Eds.; OFM. C. P. Yeri, Tran.; 1st ed., Vol. 1). Pohon Cahaya.
- Van Rees. (2016). *Montrado* (S. Supradah & M. Krismi, Eds.; 1st ed.). Pohon Cahaya.
- Veth. (2017). *Borneo Bagian Barat* (OFM. C. P. Yeri & R. Fransiskus, Eds.). Institut Dayakologi.
- Yogi, P. P. B. I. (2016). *Lanskap Pertambangan Penambang Tionghok Di Montrado, Kalimantan Barat: Pendekatan Arkeologi Sejarah*.